

## **BAB II**

### **PENELITIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Bagi peneliti yang melakukan penelitian, penelitian sebelumnya memberikan referensi dasar yang memungkinkan mereka menyelidiki dan menguraikan gagasan terkait. Penulis menyebutkan penelitian-penelitian lain dalam buku, jurnal, dan sumber daring yang dapat menyempurnakan bahan penelitian dan mencerahkan penelitian yang sedang dilakukan, meskipun mungkin tidak selalu dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama persis dengan penelitian penulis.

Penelitian pertama meneliti bagaimana BNN membantu dengan menawarkan dukungan untuk mengatasi berbagai kendala dalam Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Intervensi Berbasis Masyarakat Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Deskriptif Pada Remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu)”, Selain memulai dan mengakhiri pemantauan untuk menemukan kerentanan dan kekhawatiran yang dihadapi serta mengevaluasi program untuk menentukan keberhasilannya dalam mencapai hasil yang diharapkan, lembaga tersebut membantu dengan memberikan inspirasi dan bantuan. Menurut penelitian ini, 6,1% orang Indonesia berusia 15 tahun ke atas menderita masalah emosional dan mental, yang ditandai dengan gejala seperti kecemasan dan depresi (Rahma et al., 2023).

Penelitian “Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Timur”, Badan Narkotika

Nasional Provinsi Jawa Timur juga mengungkapkan bahwa BNN telah melakukan sejumlah inisiatif untuk memerangi peredaran narkoba. Diantaranya adalah kampanye untuk menghentikan promosi narkoba dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan narkoba. Mengidentifikasi dan mengatasi wilayah yang rentan terhadap perdagangan narkoba adalah tujuan lain dari program pemberdayaan alternatif dan inisiatif partisipasi masyarakat. Menurut Adhima dan Oktariyanda (2023), inisiatif ini mencakup sesi pelatihan yang bertujuan untuk menurunkan penggunaan narkoba, meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat, mendukung pasien selama rehabilitasi agar menjadi pemilik usaha yang lebih sukses dan mandiri, serta mendorong peningkatan ekonomi melalui keterlibatan masyarakat yang konstruktif untuk mencegah keterlibatan obat.

Ketiga, penulis “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia” mendasarkan penelitiannya pada hasil tersebut. Ia menemukan bahwa inisiatif pendidikan digunakan sebagai tindakan pencegahan untuk mempengaruhi peluang dan faktor pendorong yang berkontribusi terhadap kejahatan terkait narkoba, atau yang biasa disebut sebagai “kriminologi korelatif.” Hal ini membantu menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan pencegahan, serta kondisi untuk hidup bebas narkoba, seperti penolakan perusahaan untuk menerima kejahatan narkoba resmi dan pengawasan langsung terhadap saluran perdagangan gelap untuk menjaga agar Bahaya Polisi tidak menjadi kenyataan. ancaman. Penangkapan pengedar dan pengguna narkoba merupakan salah satu cara untuk melakukan tindakan penegakan hukum atau represif. (Haryanto, 2018)

Keempat, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika,” hasil penulis berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa BNN memberikan prioritas yang tinggi pada pencegahan dalam rangka pemberantasan kejahatan narkoba. Di bidang ini, BNN telah melakukan pencegahan di lembaga pemerintah, komunitas, keluarga, dan lingkungan lainnya. Hal ini juga telah memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan narkoba di semua situasi tersebut. (Setiawan & rekan, 2020)

Kelima, “Strategi BNN Dalam Peredaran Mendadak Narkotika di Kota Makassar” Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan memaparkan tentang taktik yang digunakan untuk menghentikan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Taktik ini berpusat pada peningkatan dan penguatan upaya untuk mencegah peredaran obat-obatan terlarang. Inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan perdagangan narkoba juga disertakan. Program pemberdayaan masyarakat juga tersedia dengan tujuan menghentikan konsumsi narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang. Inisiatif-inisiatif ini sangat menekankan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba (Nurlaelah et al., 2019).

## 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu

Tabel 1.  
Matriks Penelitian Terdahulu

| No. | Penelitian/Judul Penelitian  | Hasil Hasil   | Relevansi   |
|-----|--|---|---|
| 1.  | <p>Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Intervensi Berbasis Masyarakat Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Deskriptif Pada Remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu).</p> <p>Oleh: Icha Fitria rahma / Mahfudz Sidiq / Budhy Santoso / Agung Nugroho Puspita</p> <p>Multidiciplinary Journal Pascasarjana Universitas Jember. Vol 6, No 1 (2023)</p> | <p>Badan Narkotika Nasional berperan dalam melakukan asistensi dalam melakukan pendampingan untuk menghadapi berbagai hambatan. Badan Narkotika Nasional berperan dalam fasilitasi yaitu memberikan motivasi dan dukungan.</p> <p>Badan Narkotika Nasional berperan dalam monitoring awal dan monitoring akhir untuk mencatat kelemahan serta</p> | <p>Persamaan: Tempat penelitian sama-sama berlokasi di Kota Batu</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu dilaksanakan di suatu desa, sedangkan peneltian sekarang dilaksanakan di BNN Kota</p> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 2. | <p>Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur.</p> <p>Oleh: Naila Fauza Adhima / Trena Aktiva Oktariyanda</p> <p>Publika, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Vol 11, No 4 (2023) 2365–2378</p> | <p>BNN mempunyai program untuk mencegah peredaran narkoba dengan memiliki beberapa program yaitu advokasi, lalu ada program pemberdayaan peran serta masyarakat, dan program pemberdayaan alternatif. Advokasi sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya narkoba dan melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.</p> | <p>Persamaan:</p> <p>Penelitian sama-sama membahas tentang kebijakan BNN.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu luasnya mencakup Provinsi, sedangkan penelitian sekarang luasnya hanya mencakup kota</p> |
|----|--|--|---|

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 3. | <p>Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia.</p> <p>Oleh: Bayu Puji Haryanto</p> <p>Jurnal Daulat Hukum Universitas Sultan Agung. Vol 1, No. 1 (2018)</p> | <p>Pendekatan preventif mencakup pendidikan yang ditargetkan untuk mengubah faktor “korelatif kriminologis”—penyebab dan peluang—dari kejahatan terkait narkoba. Melalui promosi dan penetapan norma-norma yang mendukung kehidupan bebas narkoba, inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, dan mencegah perilaku terkait narkoba. Mereka sangat menekankan perlawanan</p> | <p>Persamaan:</p> <p>Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu cakupannya luas, sedangkan penelitian sekarang mencakup Kota</p> |
|----|--|---|--|

terhadap pelanggaran  
terkait narkoba..



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 4. | <p>Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.</p> <p>Oleh: Ida Bagus Trisnha Setiaawan / Ida Ayu Putu Widiati / Diah Gayatri Sudibya</p> <p>Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum</p> | <p>Fokus utama pendekatan BNN terhadap pelanggaran terkait narkoba adalah pencegahan. BNN telah melakukan upaya pencegahan di sejumlah sektor, termasuk sektor publik, komunitas, keluarga, dan organisasi. Salah satu inisiatif ini adalah mengadakan seminar pelatihan untuk memberikan informasi kepada industri-industri tersebut mengenai risiko yang terkait dengan narkoba..</p> | <p>Persamaan:</p> <p>Penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan: Penelitian berfokus pada aspek hukum, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada strategi dan kebijakan</p> |
|----|--|---|--|



|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 5. | <p>Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar.</p> <p>Oleh: Nurlaelah / Ahmad Harakan / Ansyari Mone</p> <p>Journal of Government and Political Studies. Vol 2, No 1 (2019)</p> | <p>BNNP Sulawesi Selatan menggunakan berbagai taktik untuk menghentikan peredaran narkoba, dengan penekanan khusus pada peningkatan dan peningkatan langkah-langkah untuk menghentikan penggunaan narkoba dan perdagangan ilegal. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan narkoba dan peredaran gelap merupakan salah satu taktik tersebut..</p> | <p>Persamaan:</p> <p>Penelitian sama-sama membahas kebijakan dalam menanggulangi peredaran narkoba</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian terdahulu, penelitian berlokasi di Makassar, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Batu</p> |
|----|--|---|---|

## **2.3 Tinjauan Pustaka**

### **2.3.1 Narkoba**

Tarigan (2017) mendefinisikan narkoba sebagai opioid, psikotropika, dan zat ilegal yang mengandung unsur adiktif dan berbahaya. Definisi ini menjadi dasar teori obat yang digunakan dalam penelitian ini. Kata Yunani narkoun atau narke, yang berarti hilangnya sensasi, adalah asal kata narkoba. Penyalahgunaan zat sering kali mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan di kalangan penggunanya. Narkotika meliputi narkotika, psikotropika, dan senyawa lain yang bersifat adiktif (Darwis et al., 2018). Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan, sering menggunakan kata ini.

Alifia (2020) menyatakan bahwa kata narkoba merupakan akronim dari bahan berbahaya dan narkotika. Ungkapan ini terkenal dalam budaya kita, biasanya muncul di artikel berita dan digunakan oleh aparat penegak hukum.

### **2.3.2 Strategi**

Menurut M. Echols & Shadily (2007), kata strategiberasal dari bahasa latin strategic yang berarti rencana atau pendekatan, dan strategia yang berarti ilmu tentang taktik. Menerapkan strategi ke dalam praktik adalah perencanaan yang cermat dengan tujuan mengidentifikasi tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Perbaikan

berkelanjutan dan penyelarasan dengan harapan dan keinginan konsumen di masa depan merupakan tujuan dari proses berkelanjutan ini (Herwandi, 2012).

Rencana yang koheren, mencakup segalanya, dan terintegrasi inilah yang didefinisikan oleh William F. Glueck dan Lawrence Jauch sebagai strategi (Saladin, 2003). Menurut Mangkuprawira (2003), strategi adalah rencana jangka panjang yang menguraikan tujuan dan rangkaian kegiatan yang direncanakan serta mekanisme untuk mencapainya.

#### 1. Perumusan Strategi

Setelah mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi, strategi harus dikembangkan. Proses perumusan strategi mencakup penetapan tujuan organisasi, mengidentifikasi target, membuat rencana untuk mencapai target tersebut, dan membuat pedoman kebijakan.

##### 1) Misi

Pernyataan misi suatu organisasi menguraikan tujuan dan pembenaran keberadaannya. Pernyataan misi yang ditulis dengan baik menguraikan nilai-nilai inti organisasi dan membedakannya dari organisasi atau kelompok lain.

##### 2) Tujuan

Pada akhir perencanaan kegiatan terdapat tujuan. Tujuan menentukan apa yang harus dilakukan dan, jika memungkinkan maka harus dapat diukur. Menyelesaikan tugas akan mengarah pada pencapaian tujuan lembaga.

##### 3) Strategi

Strategi suatu lembaga adalah dokumen perencanaan terperinci yang menguraikan bagaimana organisasi akan melaksanakan tujuannya. Strategi mengurangi hambatan terhadap kemampuan bersaing dan memaksimalkan keunggulan kompetitif

#### 4) Kebijakan

Aturan luas untuk pengambilan keputusan organisasi disediakan oleh kebijakan. Kebijakan juga merupakan arahan umum yang menghubungkan strategi dan pelaksanaan dengan penelitian. Tujuan dan taktik memimpin penafsiran dan penerapan kebijakan. (Rachmat, 2014)

### 2.3.3 Kebijakan

Prinsip-prinsip umum dalam pengambilan keputusan organisasi adalah kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut menguraikan pedoman umum yang menghubungkan strategi dan pelaksanaan dengan penelitian. Tujuan dan taktik setiap divisi organisasi memandu bagaimana kebijakan ini dipahami dan diterapkan (Rachmat, 2014).

#### a. Tahapan Kebijakan

##### 1) Formulasi Kebijakan

Diskusi mengenai topik-topik yang tercakup dalam agenda kebijakan mengarah pada penciptaan kebijakan. Tujuan dari perumusan masalah adalah untuk menciptakan rencana, pendekatan, dan strategi untuk menangani suatu masalah atau memenuhi kebutuhan guna mengambil tindakan untuk mengatasi

masalah publik. Usulan perintah atasan maupun peraturan administratif, atau peraturan biasanya bukan merupakan hasil perumusan kebijakan.

## 2) Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya melalui undang-undang, namun bisa juga dilakukan melalui perintah eksekutif, arahan, atau keputusan pengadilan (Meutia, 2017).

## 3) Evaluasi Kebijakan

Lester dan Stewart (dikutip dalam Winarno, 2012) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan memerlukan dua tugas berbeda. Langkah pertama adalah mendeskripsikan dampak suatu kebijakan untuk menganalisis dampaknya. Langkah kedua adalah mengevaluasi apakah suatu kebijakan telah berhasil mencapai tujuannya atau masih belum mencapai tolak ukur yang telah ditetapkan. Untuk menginformasikan tindakan dan keputusan di masa depan, evaluasi kebijakan mencakup pengukuran dan penilaian faktual terhadap dampak kebijakan atau program serta proses implementasinya.

## 2) Evaluasi Kebijakan

Tahap penting dalam pertimbangan menyeluruh atas kebijakan publik adalah proses evaluasi. Evaluasi lebih dari sekadar memberi nilai pada kebijakan yang telah dilaksanakan; evaluasi juga membuka pintu bagi pembuatan kebijakan dan analisis

lebih lanjut. Evaluasi mencakup sejumlah hal elemen krusial yang sama pentingnya dengan elemen-elemen yang tercakup dalam fase analisis kebijakan sebelumnya.

Kegiatan evaluasi seringkali mempunyai empat (empat) karakteristik utama: pertama, fokus pada nilai. Kedua, hubungan antara nilai dan fakta. Ketiga, memberikan bobot yang sama terhadap masa lalu dan masa kini. Keempat, ada nilai ganda. (Meutia, 2017).

#### 1) Alasan Evaluasi Kebijakan

Perlunya upaya evaluasi kebijakan yang terbagi dalam dua kategori: internal dan eksternal, dijelaskan oleh beberapa faktor. Di dalam:

- a) Mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan: Evaluasi kebijakan membantu dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.
- b) Mengevaluasi kemandirian kebijakan: Latihan penilaian menjelaskan seberapa baik kebijakan melaksanakan tujuan yang diharapkan.
- c) Pencegahan kesalahan: Menilai hasil kebijakan memastikan bahwa pembelajaran yang diperoleh dari penilaian membantu menghindari kesalahan serupa ketika menerapkan kebijakan berikutnya.

Sementara itu, motivasi eksternal mempunyai dua peran atau lebih:

- a) Melestarikan gagasan akuntabilitas publik: Baik pembuat kebijakan terlibat langsung atau tidak dalam implementasi kebijakan, mereka bertanggung jawab kepada publik melalui evaluasi kinerja kebijakan yang telah diberlakukan.

- b) Untuk menggambarkan manfaat kebijakan: Melalui inisiatif penilaian kebijakan, masyarakat umum, khususnya penerima manfaat dan kelompok sasaran, dapat memahami manfaat kebijakan secara terukur..

## 2) Fungsi Evaluasi Kebijakan

Penyediaan data yang dapat diandalkan mengenai kinerja kebijakan merupakan tugas mendasar dari kegiatan evaluasi kebijakan. Evaluasi menunjukkan dan mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah diwujudkan sebagai hasil dari inisiatif kebijakan publik.

Fungsi penilaian adalah membantu upaya menjelaskan dan mengkritik nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam proses pemilihan tujuan dan sasaran. Dengan mendefinisikan tujuan dan sasaran secara praktis, evaluasi dapat menjelaskan nilai.

Melengkapi penerapan metode lain dalam analisis kebijakan, seperti diskusi masalah, rekomendasi, dan berbagai aktivitas lainnya, merupakan fungsi lain dari evaluasi. Menurut Meutia (2017), analisis kebijakan melibatkan berbagai tindakan yang saling berhubungan dengan evaluasi kebijakan, yang tidak dilakukan dalam ruang hampa.

### 2.3.4 Masyarakat

Sementara itu, pengertian masyarakat menurut para ahli sebagai berikut:

Sebagaimana dikemukakan oleh Eliana, S. K. M., Sumiati, S., & Sumiati, S. (2016), masyarakat terdiri dari individu-individu yang bersosialisasi, atau melakukan aktivitas lain, satu sama lain.

Prasetyo, D. (2019) mengartikan masyarakat sebagai kumpulan individu atau orang-orang yang mempunyai rumah bersama. Istilah masyarakat berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti teman, dan menandakan kontak sosial, transformasi sosial, dan rasa persatuan.

Saragih, H. (2021) mengartikan masyarakat sebagai suatu komunitas kohesif dari manusia-manusia yang saling bergantung satu sama lain.

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu komunitas yang bersatu dan saling percaya dimana orang-orangnya saling bergantung satu sama lain. Secara umum masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang hidup dalam suatu komunitas terencana (Hamda, N., 2014).

### **2.3.5 Strategi Penanggulangan Narkoba**

Petugas dan pejabat yang terlibat dalam kegiatan anti-narkoba di lembaga-lembaga menerapkan berbagai kebijakan dan taktik pemerintah untuk memerangi perdagangan narkoba dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Pencegahan primer, yang bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba pada individu, keluarga, dan komunitas, merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi permintaan akan narkoba. Pencegahan tersier berkonsentrasi pada pencegahan kekambuhan penyakit pada individu yang telah menyelesaikan pengobatan dan rehabilitasi, sedangkan pencegahan sekunder menasar kelompok atau komunitas rentan. Dari budidaya hingga distribusi, pasokan narkotika gelap dan prekursornya untuk keperluan industri, ilmu pengetahuan, dan medis diawasi oleh pemerintah.



Penanaman, produksi, impor, ekspor, pengangkutan, penyimpanan, distribusi, dan penyerahan oleh pejabat yang berwenang semuanya berada di bawah pengawasan pengawasan ini. Jalur distribusi narkoba melalui darat, laut, dan udara juga dikendalikan. Di pelabuhan dan bandara, kelompok kerja pencegahan sedang dibentuk oleh badan khusus seperti Badan Pengawas Obat Nasional. Mengurangi permintaan obat-obatan dan mengawasi pasokan obat-obatan adalah dua taktik utama yang secara resmi diakui dan diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, dalam upaya menghentikan penyebaran HIV/AIDS terkait penggunaan narkoba, organisasi seperti BNN bermitra dengan Komite Pencegahan HIV/AIDS (KPA). Dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba, Polri telah menetapkan kebijakan dan struktur organisasi. Struktur-struktur ini memberikan penekanan yang kuat pada pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, dan mereka telah menetapkan tugas khusus untuk kegiatan medis dan penelitian. (Mintawati & Budiman, 2021).

## **2.4 Landasan Teori**

### **2.4.1 William F. Glueck dan Lawrence Jauch**

Jauch dan Glueck mendefinisikan strategi sebagai rencana yang kohesif mencakup semua, dan terintegrasi menyajikan permasalahan lingkungan pada suatu lembaga dan dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan utama pemeliharaan dapat dicapai melalui penerapan yang tepat dari lembaga tersebut. (Yatminiwati, 2019).

Keputusan manajemen puncak yang memobilisasi sumber daya organisasi yang besar untuk mencapai tujuan disebut sebagai keputusan strategis. Hal ini juga menekankan sifat organisasi yang berfokus pada masa depan dengan menentukan arah jangka panjangnya, yang biasanya berlangsung setidaknya lima tahun. Strategi harus mempertimbangkan dinamika internal dan elemen eksternal yang mempengaruhi lembaga selama pembentukannya karena mempunyai konsekuensi luas di berbagai divisi atau departemen dalam suatu organisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa strategi adalah prosedur yang disengaja yang dirancang untuk mencapai tujuan lembaga dalam jangka waktu yang lama. Setelah implementasi rencana, keberhasilan atau kegagalan organisasi atau lembaga akan ditentukan. (Rachmat, 2014).

William F. Glueck dan Lawrence Jauch

Kebijakan adalah pedoman luas yang digunakan organisasi untuk melaksanakan keputusan atau tindakan. Kebijakan bisnis adalah studi tentang isu-isu yang berdampak pada kesuksesan dan karakter suatu lembaga secara keseluruhan, serta peran dan tanggung jawab kepemimpinan umum organisasi. (William F. Gluck & Lawrence Jauch, 1996)

Kesimpulannya, ketika suatu strategi dirancang untuk berhasil mencapai tujuan organisasi atau lembaga, maka hal itu berubah menjadi kebijakan. Melalui analisis ini, kita dapat menentukan langkah tepat yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu sebagai kerangka menyeluruh yang dimaksudkan untuk melawan peredaran obat-obatan terlarang yang berbahaya dan membuat kecanduan, terutama di

kalangan generasi muda yang memiliki masa depan yang penting bagi bangsa dan negara.



## 2.5 Kerangka Teori

